

Peranan Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Anggota pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nabire

Petrus Tekege

Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Wiyata Mandala, Indonesia

Alamat: Jl. Sutamsu, Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98818

Korespondensi penulis : petrustekegeuswim@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to find and provide suggestions for the role of leadership in improving performance in the Nabire district DPRD office. The approach method is analytical descriptive, with the main problem being the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Nabire district and the extent of the performance of the members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Nabire district. The results of the research show that the work of the leadership of the Nabire Regency DPRD has not been maximized, which in the future requires increased knowledge and skills so that service to the community will be good.*

Keywords: *Role, leadership and performance.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan memberikan saran peran pimpinan dalam meningkatkan kinerja di kantor DPRD kabupaten Nabire. Metode pendekatannya adalah deskriptif analitis, dengan pokok permasalahan Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nabire dan sejauh manakah Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya kerja pimpinan DPRD kabupaten Nabire yang kedepan membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi baik.

Kata Kunci: Peranan, pimpinan dan Kinerja.

1. LATAR BELAKANG

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pejabat daerah, tidak terlepas dari peranan badan eksekutif daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Karena kedua lembaga itulah yang berperan menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan di daerah. Dalam sejarah perjalanan tata pemerintahan di Indonesia, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwarnai dengan politik hukum pemerintahan yang dianut. Hal ini memberikan wacana dinamika peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di batasi oleh ruang dan waktu yang sangat deteminan dengan kepentingan pihak pemegang kekuasaan pemerintahan.

Dalam system pemerintahan di Indonesia kedudukan dan peran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya sebatas memberikan persetujuan agenda politik pihak eksekutif dengan tetap menjalankan fungsi sebagai badan Legislatif. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi antara lain :

- a. Legislasi yaitu, fungsi membuat peraturan daerah bersama kepala daerah menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap keputusan DPRD menjadi

ukuran bagi tercapainya kondisi daerah yang lebih baik dan untuk melaksanakan fungsi tersebut setiap anggota dituntut untuk lebih berkualitas dan memiliki dedikasi kerja yang prima dalam menyikapi semua persoalan yang timbul di masyarakat.

- b. Fungsi budget atau fungsi anggaran. Artinya Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) ikut terlibat dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bersama pemerintah daerah. Dalam penyusunan ini DPRD harus berperan baik sesuai kebutuhan aspirasi masyarakat.
- c. Fungsi Pengawasan. Sebagai orang yang mewakili rakyat anggota DPRD harus melakukan pengawasan terhadap roda pembangunan daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas yang berat termasuk DPRD kabupaten Nabire. Tetapi dalam kenyataannya DPRD Nabire tidak banyak berperan. Hal ini terlihat pada setiap kebijakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menunjukkan fungsi maksimalnya.

Perumusan Permasalahan

Dengan begitu yang menjadi permasalahan adalah:

- 1) Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nabire.
- 2) Sejauh manakah Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nabire.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif menurut **Sumandi Suryabrata (2003:75)** mengemukakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi / daerah tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah upaya untuk menggambarkan variabel yang dibahas secara nyata lewat fakta-fakta yang ada.

Lokasi penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut **Mantara** dan **kosta** dalam **Singarimbun dan Sofian Efendi** menyatakan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peranan pimpinan dalam meningkatkan kinerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire.yang berjumlah 36 orang.

Sampel

Menurut **Kartini Kartono**, menyatakan bahwa : sampel adalah contoh, master, representant wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya. Sedangkan sampling adalah aktivitas mengumpulkan sampel. Hal ini berarti bahwa sampel bertujuan untuk memperoleh data dengan jalan mengamati sebagian dari populasi.

Untuk menentukan sampel dari populasi yang ada penulis berpedoman pada pendapat **Winarno Surachmad**, yang mengatakan bahwa “bila populasi di bawah 100 dipergunakan sampel 50% dan diatas 1000 sebesar 15%.

Dengan demikian dari populasi yang berjumlah 30 orang kemudian ditentukan sampel 50% dari 30 orang (jumlah populasi) sehingga yang dijadikan sampel 25 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling adalah proporsie sampling atau pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, rondon atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Dimana untuk memilih dan menentukan sampel didasarkan kepada ketentuan bahwa sampel / responden yang diambil adalah responden yang mengetahui tentang kegiatan-kegiatan dalam sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah (a). **Studi Kepustakaan**, (b).**Studi Lapangan**. Dalam mengadakan penelitian lapangan ada beberapa teknik yang digunakan seperti **teknik observasi, teknik Interview dan teknik Angket (Kuisisioner)**.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menurut (**Suharsimi Arikunto, 1992:203**), setelah mengumpulkan data, maka selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dari para responden harus diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) *Editing*. Pada tahap ini data diperiksa kembali untuk mengetahui kepastian dan kejelasan, kesesuaian dan relevansi jawaban mereka.

- 2) *Tabulating*. Pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa teliti dan teratur kedalam tabel tunggal dan silang yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Teknik Analisa Data

Dalam penulisan karya ini di gunakan pengolahan data analisis kualitatif dan analisa kuantitatif sederhana, guna menginterpretasikan data dan memecahkan permasalahan dalam kajian ini perlu digunakan rumus tertentu untuk mempermudah hasil yang dipecahkan. Sehubungan dengan ini maka penulis gunakan rumus distribusi frekuensi (**Dayan, 1977:17**).

Rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Prosentase di cari

F = Distribusi frekuensi jumlah setiap responden

= Besarnya sample (kesatuan) atau jumlah responden yang diteliti

100% = Nilai konstanta

Dasar teori kajian.

Peranan Pimpinan

Menurut **Sondang P. Siagian (2006:30)** suatu tujuan organisasi dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami oleh organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas pimpinan yang memiliki orang-orang yang di serahi tugas memimpin dalam organisasi itu.

Peran menurut **H. Jumari Ismanto (2006:12)** bahwa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang peranan utama dalam terwujudnya sesuatu hal. Secara etimologis pengertian peranan menurut **Puwadarminta (2001:854)** yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa, yang mempunyai pengaruh besar. Untuk itu pemimpinan memiliki beban yang harus dijalani dalam beberapa hal sebagai berikut:

Ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Selain ketaatan di dalam melaksanakan aturan waktu yang telah ditentukan, seorang karyawan juga diharapkan dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan atau dipercayakan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketaatan dalam melaksanakan tugas disini dimaksudkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1923 tentang Aparatur Sipil negara (ASN). PNS merupakan status pegawai

pemerintahan yang terganbung dalam formasi ASN. Sederhannya, ASN adalah aparatur pemerintah yang di dalamnya mencakup status kepegawaian PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Maksud adanya peraturan tersebut untuk menjamin terpeliharanya tata tertib akan kelancaran tugas yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai dimana tanggung jawab dan kewenangan dari setiap pegawai menjadi jelas sehingga para pegawai dapat menjadi panutan dan teladan dalam masyarakat.

Ketaatan Waktu Kerja

Ketaatan terhadap ketentuan jam kerja adalah ketepatan waktu senang atau betah di kantor, dan ketepatan meninggalkan tempat kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja merupakan upaya pembinaan pegawai untuk dapat meningkatkan peranan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dan sebagai seorang pegawai, maka peranan terhadap tugasnya dan terhadap peraturan perlu disiplin diri harus ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas setiap hari tetap patuh dan tahu menghargai waktu serta dapat membedakan waktu kerja dan waktu di luar jam kerja.

Pimpinan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan Wakil-Wakil ketua serta mengumumkannya dalam rapat paripurna.
- b) Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaan;
- c) Pimpinan rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertip dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- d) Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e) Melaksanakan keputusan rapat;
- f) Mengkoordinasikan komisi-komisi dan panitia-panitia;
- g) Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak yang bersangkutan;
- h) Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada pemerintah Daerah;
- i) Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan kepala Daerah dan pemerintah tingkat atas;
- j) Menjadi juru bicara DPRD;
- k) Mewakili alat kelengkapan DPRD di pengadilan;

- 1) Dalam mengambil keputusan dan kebijakan pimpinan DPRD dapat berkordinasi dengan pimpinan Fraksi-fraksi.

Kinerja

Menurut **Wyatt's** dalam **Kisdarto Atmosoeprto (1999:5)** kinerja adalah fungsi dari tingkat kemampuan dan derajat motivasi, dimana kinerja adalah fungsi dari kemampuan disertai motifasi. Kemampuan melaksanakan pekerjaan atau tugas dapat dilihat dari seberapa jauh motifasi yang ada di dalam seseorang apakah karena keterlibatan atau karena keterikatan. Dengan demikian kemampuan dapat ditingkatkan melalui pendidikan peralihan dan pengalaman. Sementara **Roger Belows** mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu penilaian oleh atasannya atau oleh seseorang yang berada dalam posisi untuk mengamati atau menilai prestasinya (dalam **Ruky, A.S. 2001 :12**). Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pegawai dalam suatu organisasi maka dapat dijelaskan beberapa indikator sebagai sebagai berikut:

Efektifitasaa kerja

Menurut **S.P Siagian (1983:149)**, bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan artinya suatu tugas dinilai baik bilamana tugas diselesaikan dan tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Ditambah juga dengan **Richard, M. Sterrs, (1980 :5)**, bahwa efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga sependai mungkin dalam usaha mengejar tujuan dan operasional.

Efisiensi Kerja

Efisiensi kerja menurut **Salim dan Moodward (agus Dwijayante, 200:51)** Adalah perbandingan input dan output, selanjutnya bilamana suatu kerja dianalisis, dapatlah dipertahankan dalam segi, lain intinya ialah rangkaian aktifitas-aktifitas itu dilakukan seperti:

- 1) Pemakaian pikiran
- 2) Pemakaian tenaga
- 3) Pemakaian waktu
- 4) Pemakaian ruangan
- 5) Pemakaian benda

Hasil dari usaha yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nabire terhadap pekerjaannya dengan menggunakan pikiran, tenaga, waktu, ruangan dan biaya.

Suatu peraturan pada prinsipnya harus dipatuhi oleh setiap orang begitu pula halnya dengan peraturan yang ada pada suatu organisasi. Para pegawai dituntut untuk mematuhi

kewajiban dan tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga pimpinan dan anggota dapat taat pada waktu kerja dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Penyajian dan Analisa Data

Penyajian Data

a. Peranan Pimpinan

Ketaatan Waktu Kerja

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yang dirangkum dari penelitian mengenai ketaatan waktu kerja di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nabire, maka hasilnya dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Kehadiran pada waktu kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	10	0,4
2	Kadang-kadang	8	0,32
3	Tidak	7	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 06 di atas tentang kehadiran pada waktu kerja yaitu yang menjawab selalu 10 orang atau 0,4% dan yang menjawab kadang-kadang 8 orang atau 0,32% sedangkan yang menjawab tidak 7 orang atau 0,28%.

Dari hasil data di atas menunjukkan kehadiran dewan perwakilan rakyat daerah pada hari kerja di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nabire sudah cukup baik, namun perlu ada pengawasan dari pimpinan.

Tabel 2. Masuk Kantor Tepat Waktu

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	15	0,4
2	Kadang-kadang	10	0,32
3	Tidak	-	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 07 di atas tentang masuk kantor tepat waktu, yang menjawab selalu 15 orang atau 0,6% sedangkan yang menjawab kadang-kadang 10 orang atau 0,4%.

Tabel 3. Pulang kantor tepat Waktu

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	10	0,4
2	Kadang-kadang	15	0,32
3	Tidak	-	0,28
Jumlah		25	

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 07 di atas tentang pulang kantor tepat waktu yaitu yang menjawab selalu 10 orang atau 0,4% yang menjawab kadang-kadang 10 orang atau 0,6%.

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa ketaatan DPRD di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nabire dalam hal ini pulang kantor tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang berlaku dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pimpinan.

Tabel 4. Menggunakan Jam Kerja Untuk Urusan Pribadi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	4	0,4
2	Kadang-kadang	10	0,32
3	Tidak	11	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 09 di atas tentang menggunakan jam kerja untuk urusan pribadi yaitu yang menjawab selalu 5 orang atau 0,2% yang menjawab kadang-kadang 10 orang atau 0,4% sedangkan yang menjawab tidak 11 orang atau 0,44%.

Dari hasil olahan data di atas menunjukkan bahwa penggunaan jam kerja untuk urusan pribadi pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nabire dikatakan belum cukup baik, hal ini disebabkan kurang perhatian dan ketegasan dari pimpinan.

Tabel 5. Rekapitulasi Indikator Pada Ketaatan Waktu Kerja

No	Parameter	Kategori jawaban			persentase
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Kehadiran pada waktu kerja	10 (0,4%)	8 (0,32% 1)	7 (0,28%)	25 (100%)
2	Masuk kantor tepat waktu	15 (0,6%)	10 (0,4%)	-	25 (100%)
3	Pulang kantor tepat waktu	10 (0,4%)	15 (0,6%)	-	25 (100%)
4	Menggunakan jam kerja untuk urusan pribadi	4 (0,16% %)	10 (0,4%)	11(0,44%)	25 (100%)
	Jumlah	11	8	6	25

		(0,44%)	(0,32%)	(0,24%)	(100%)
--	--	---------	---------	---------	--------

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 10 tentang Rekapitulasi indikator pada ketaatan waktu kerja cukup tinggi

Ketaatan dan tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas

Selain Ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan, seorang DPR juga harus sanggup menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil / tindakan yang dilakukan.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas maka dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Taat Dalam Melaksanakan Tugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	15	0,4
2	Kadang-kadang	-	0,32
3	Tidak	10	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 11 tentang taat dalam melaksanakan tugas yaitu yang menjawab selalu 0,6 orang atau 0,6% yang menjawab tidak 10 orang atau 0,4 sedangkan yang menjawab kadang-kadang tidak ada.

Uraian diatas menunjukkan bahwa ketaatan DPR dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan cukup baik perlu adanya perhatian dan pimpinan terhadap bawahannya yang tidak pernah taat dalam melaksanakan pekerjaan.

Tabel 7. Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	5	0,4
2	Kadang-kadang	9	0,32
3	Tidak	11	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024

Berdasarkan tabel 12 tentang penyelesaian pekerjaan tepat waktu yaitu yang menjawab sanggup 5 orang atau 0,2 yang menjawab kadang-kadang 9 orang atau 0,36% sedangkan yang menjawab tidak 11 orang atau 0,44%.

Berdasarkan jawaban responden ini maka penulis simpulkan bahwa penyelesaian pekerjaan tepat waktu oleh DPRD pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nabire belum berjalan dengan baik karena mereka tidak memahami tugas / pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan untuk itu pimpinan harus lebih memperhatikan bawahannya dalam hal memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga pemahaman terhadap pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 8. Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	12	0,4
2	Kadang-kadang	5	0,32
3	Tidak	8	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024

Berdasarkan tabel 13 tentang Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yaitu yang menjawab selalu 12 orang atau yang menjawab kadang-kadang 5 orang atau 0,2 % sedangkan yang menjawab tidak 8 orang atau 0,32.

Berdasarkan hasil pengolahan data ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab DPR dalam melaksanakan tugas yang diberikan di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire boleh dikatakan sudah cukup baik, namun masih ada yang menjawab tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena mereka belum mengikuti pendidikan dan pelatihan..

Tabel 9. Memperoleh Hukuman Atas Pelanggaran Aturan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	6	0,4
2	Kadang-kadang	9	0,32
3	Tidak	10	0,28
Jumlah		25	

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 14 tentang Memperoleh hukuman atas pelanggaran aturan yaitu yang menjawab selalu 6 orang atau 0,24% yang menjawab kadang-kadang 9 orang atau 0,36% sedangkan yang menjawab tidak 10 orang atau 0,4%.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire sebagian besar sudah mematuhi peraturan yang di keluarkan / ditetapkan namun masih ada yang memperoleh hukuman ringan atas pelanggaran aturan yang ditetapkan, untuk itu pimpinan harus membimbing dan mengawasi bawahannya.

Tabel 10. Taat peraturan Karena Kesadaran Pentingnya Aturan Kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	7	0,4
2	Kadang-kadang	9	0,32
3	Tidak	9	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 10 tentang Taat peraturan karena kesadaran pentingnya aturan kerja yaitu yang menjawab selalu 7 orang atau 0,28% yang menjawab kadang-kadang 9 orang atau 0,36% sedangkan yang menjawab tidak 9 orang atau 0,36%.

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas maka penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire belum taat terhadap peraturan kerja.

Tabel 11. Rekapitulasi Indikator Pada Ketaatan Dan Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas

No	Parameter	Kategori jawaban			Persentase
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Taat dalam melaksanakan tugas	15 (0,6%)	-	10 (0,4%)	25 (100%)
2	Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	5 (0,2%)	9 (0,36%)	11 (0,44%)	25 (100%)
3	Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas	12 (0,48%)	5 (0,2%)	8 (0,32%)	25 (100%)
4	Memperoleh hukuman atas pelanggaran aturan	6 (0,24%)	9 (0,36%)	10 (0,4%)	25 (100%)
5	Taat peraturan karena kesadaran pentingnya aturan kerja	7 (0,28%)	9 (0,36%)	9 (0,36%)	25 (100%)
	Jumlah	8 (0,32%)	5 (0,2%)	12 (0,48%)	25 (100%)

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 11 tentang Rekapitulasi indikator pada ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas belum baik karena jawaban responden seimbang.

Tabel 12. Variabel Peranan Pimpinan

No	Parameter	Kategori jawaban			Persentase
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Ketaatan dan Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas	8 (0,32%)	5 (0,2%)	12 (0,48%)	25 (100%)
2	Ketaatan Waktu Kerja	11 (0,44%)	8 (0,32%)	6 (0,24%)	25 (100%)

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Kinerja

Kinerja adalah fungsi dari tingkat kemampuan dan derajat motivasi, dimana kinerja adalah fungsi dari kemampuan disertai motivasi

Data mengenai kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire penulis sajikan di bawah ini berdasarkan indikator-indikator yang efektifitas kerja dan efisiensi kerja.

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka data kinerja DPRD pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire yang telah di dapati dilihat pada tabel berikut ini.

Efektifitas Kerja

Yang di maksud dengan efektifitas kerja adalah bila mana seorang DPRD harus dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yang dirangkum dan hasil penelitian mengenai efektifitas kerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire, maka hasilnya dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 13. Pekerjaan Harus Selesai Pada Waktunya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	17	0,4
2	Kadang-kadang	5	0,32
3	Tidak	3	0,28
Jumlah		25	

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 13 tentang pekerjaan harus selesai pada waktunya yang menjawab ya 17 orang atau 0,68% yang menjawab kadang-kadang 5 orang atau 0,2% sedangkan yang menjawab tidak 3 orang atau 0,12%.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pekerjaan harus selesai pada waktu cukup baik perlu adanya perhatian dari pimpinan terhadap bawahannya yang tidak pernah menyelesaikan pekerjaan pada waktunya.

Tabel 14. Tugas Dapat Selesaikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	13	0,4
2	Kadang-kadang	8	0,32
3	Tidak	4	0,28
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024.

Berdasarkan tabel 14 tentang tugas dapat selesaikan yang menjawab ya 13 orang atau 0,52% yang menjawab kadang-kadang 8 orang atau 0,32% sedangkan yang menjawab tidak 4 orang atau 0,16%..

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa DPRD di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire sebagian besar sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik hanya perlu pengawasan dari pimpinan.

Tabel 15. Pengalaman Penting Dalam Menyelesaikan Pekerjaan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	prosentase
1	Selalu	20	0,8
2	Kadang-kadang	5	0,2
3	Tidak	-	-
Jumlah		25	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer 2024..

Berdasarkan tabel 15 tentang pengalaman penting dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjawab ya 20 orang atau 0,8% yang menjawab kadang-kadang 8 orang atau 0,2% sedangkan yang menjawab tidak kenyataannya tidak ada.

Dapat disimpulkan bahwa pengalaman sangat penting dalam menyelesaikan pekerjaan.

Tabel 16. Rekapitulasi Indikator Pada Efektifitas Kerja

No	Parameter	Kategori jawaban			Persentase
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	Pekerjaan harus selesai pada waktunya	17 (0,68)	5 (0,2%)	3 (0,12%)	25 (100%)
2.	Tugas dapat selesaikan	13 (0,52%0	8 (0,32%)	4 (0,16%)	25 (100%)
3..	Pengalaman Penting dalam menyelesaikan Pekerjaan	20 (0,8%)	5 (0,2%)	-	25 (100%)
	Jumlah	5 (0,2%)	18 (0,72%)	2 (0,8%)	25 (100%)

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 16 tentang rekapitulasi indikator pada efektifitas kerja cukup.

b.Efisiensi Kerja

Yang dimaksud dengan kerja adalah pemakaian pikiran, pemakaian tenaga, pemakaian waktu, pemakaian ruangan dan pemakaian benda. Yang peneliti bahas adalah pemakaian benda..

Tabel 17. Ruang Kantor Yang Cukup Tersedia

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Cukup	18	0,72
2	Kadang	7	0,28
3	Tidak	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 17 tentang ruang kantor yang cukup tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjawab cukup 18 orang atau 0,72% sedangkan menjawab kadang 7 orang atau 0,28%.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang kantor yang cukup tersedia pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire cukup untuk para DPRD.

Tabel 18. Fasilitas Kantor Tersedia

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Ya	-	-
2	Kadang	10	0,4
3	Tidak	15	0,6
	Jumlah	25	100

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 18 tentang fasilitas kantor tersedia, responden yang menjawab kadang-kadang 10 orang atau 0,4% sedangkan tidak 16 orang atau 0,6%.

Jadi fasilitas kantor belum menunjang pekerjaan DPRD pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire.

Tabel 19. Perlengkapan Kantor Perlu ditambah

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Ya	25	100%
2	Kadang	-	-
3	Tidak	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 19 tentang perlengkapan kantor perlu ditambah yang menjawab ya 18 orang atau 100%.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peralatan pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire perlu ditambah untuk menunjang pekerjaan para DPRD.

Tabel 20. Rekapitulasi Indikator Efisiensi Kerja

No	Parameter	Kategori jawaban			Persentase
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	Ruang kantor yang cukup tersedia	18 (0,72%)	7 (0,28%)	-	25 (100%)
2.	Fasilitas kantor tersedia	-	10 (0,4%)	15 (0,6%)	25 (100%)
3..	Perlengkapan kantor perlu ditambah	25 (100%)	-	-	25 (100%)
	Jumlah	17(0,68%)	5(0,2%)	3(0,12%)	100%

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Berdasarkan tabel 20 tentang rekapitulasi indikator efisiensi kerja cukup tinggi.

Tabel 21. Variabel Kinerja

No	Parameter	Kategori jawaban			Persentase
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Efektifitas Kerja	5 (0,2%)	18 (0,72%)	2 (0,8%)	25 (100%)
2	Efisiensi Kerja	17 (0,68%)	5 (0,2%)	3 (0,12%)	25 (100%)
	Jumlah	12 (0,48)	8 (0,32)	5 (0,2)	25 (100%)

Sumber : hasil pengolahan Data primer

Maka pada bagian berikut ini akan diuraikan tentang Keadaan dewan menurut komisi-komisi/bidang tugas.

Analisis Data

Suatu peraturan pada prinsipnya harus dipatuhi oleh setiap orang begitu pula halnya dengan peraturan yang ada pada suatu organisasi. Para pegawai dituntut untuk mematuhi kewajiban dan tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga pimpinan dan anggota dapat taat pada waktu kerja dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Seiring dengan adanya hal tersebut, peranan pimpinan sudah harus berjalan dengan baik sehingga tujuan dari organisasi dapat berjalan dengan baik pula. Dengan demikian jawaban responden mengenai peranan pimpinan penulis membahas dalam dua hal yaitu:

Ketaatan dan Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas

Ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nabire, maka yang termasuk didalamnya adalah taat dalam melaksanakan tugas dan sanggup menyelesaikan pekerjaan serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian jawaban responden pada indikator ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yaitu pada sub indikator taat dalam melaksanakan tugas persentase tinggi ada pada kategori jawaban “Selalu” sebanyak 15 orang atau 0,6% pada sub indikator menyelesaikan pekerjaan tepat waktu persentase tinggi ada pada kategori jawaban ‘kurang sanggup’ sebanyak 11 Orang atau 0,44% dan sub indikator tanggung jawab dalam melaksanakan tugas persentase tinggi ada pada kategori jawaban “selalu” sebanyak 12 orang atau 0,48%. Sedangkan sub indikator memperoleh hukuman atas pelanggaran aturan persentase tinggi ada pada kategori jawaban “tidak pernah” sebanyak 10 orang atau 0,4% dan sub indikator taat peraturan karena kesadaran pentingnya aturan kerja persentase tinggi ada pada kategori jawaban “kadang” sebanyak 9 orang atau 0,36%.

Berdasarkan persentase kategori jawaban di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar DPR pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga mereka belum sadar akan pentingnya ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Ketaatan Waktu Kerja

Dalam data peranan pimpinan, khususnya kepatuhan atau ketaatan jam kerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire, maka yang termasuk didalamnya adalah ketaatan bila mana seorang DPRD harus masuk pada hari yang sudah ditentukan, pukul berapa untuk masuk kerja dan pukul berapa harus pulang.

Dengan demikian jawaban responden pada indikator ketaatan waktu kerja yaitu pada sub indikator Masuk kantor tepat waktu persentase tinggi ada pada kategori jawaban “selalu” sebanyak 15 orang atau 0,6% pada sub indikator Pulang kantor tepat waktu persentase sedang ada pada kategori jawaban “kadang-kadang” sebanyak 15 orang atau 0,6% dan sub indikator kehadiran pada waktu kerja tinggi ada pada kategori jawaban “selalu” sebanyak 10 orang atau 0,4% dan sub indikator menggunakan jam kerja untuk urusan pribadi persentase tinggi ada pada kategori jawaban “tidak pernah ” sebanyak 11 orang atau 0,44%

Berdasarkan persentase kategori jawaban di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ketaatan waktu kerja DPRD pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel tentang rekapitulasi indikator pada ketaatan waktu kerja.

Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun badan usaha atau perusahaan, maka kriteria baru yang digunakan untuk mengukur dan menilai mutu kualitas kerjanya saat ini lazim disebut dengan kinerja untuk mengetahui sejauh mana kinerja dalam suatu organisasi mereka dapat dijelaskan beberapa indikator sebagai tampilan dari organisasi.

Dengan demikian jawaban responden mengenai kinerja membahas dalam dua hal yaitu:

Efektifitas Kerja

Dalam data kinerja, khususnya efektifitas kerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire, maka yang termasuk di dalamnya adalah pekerjaan harus selesai pada waktunya, tugas dapat diselesaikan dengan pengalaman penting dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dengan demikian jawaban responden pada indikator efektifitas kerja yaitu pada sub indikator pekerjaan harus selesai pada waktunya persentase tinggi ada pada kategori jawaban “ya” sebanyak 17 orang atau 0,68% pada sub indikator tugas dapat diselesaikan persentase tinggi ada pada kategori jawaban “ya” sebanyak 13 orang atau 0,52% sedangkan pada sub indikator pengalaman penting dalam menyelesaikan pekerjaan persentase tinggi ada pada kategori jawaban “ya” sebanyak 20 orang atau 0,8%.

Berdasarkan persentase tinggi jawaban di atas maka penulis menyimpulkan bahwa efektifitas kerja DPRD pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel tentang rekapitulasi indikator pada efektifitas kerja.

Efisiensi Kerja

Efisiensi kerja pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire, maka yang termasuk didalamnya adalah ruang kantor yang cukup tersedia fasilitas kantor tersedia dan perlengkapan kantor perlu ditambah.

Dengan demikian jawaban responden pada indikator efisiensi kerja yaitu pada sub indikator ruang kantor yang cukup tersedia persentase tinggi ada pada kategori jawaban “cukup” sebanyak 18 orang atau 72% pada sub indikator fasilitas kantor tersedia persentase tinggi ada pada kategori jawaban “kadang” sebanyak 10 orang atau 0,4% dan sub indikator

Perlengkapan kantor perlu ditambah persentase tinggi ada pada kategori jawaban “ya” sebanyak 25 orang atau 100%.

Berdasarkan persentase tinggi jawaban diatas maka penulis menyimpulkan bahwa efisiensi kerja DPRD pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Nabire belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena kelengkapan kantor yang belum memadai untuk kelancaran kerja para DPRD dan juga karena kantor yang selalu pindah-pindah.

Analisis hubungan antara peranan pimpinan terhadap peningkatan kinerja anggotanya

Dalam rangka usaha penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan dewasa ini, maka seorang DPR dituntut memiliki kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan dan siap sehingga peranan pimpinan juga tergantung pada baik buruknya DPR. Hal ini berarti bahwa di dalam organisasi tersebut harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam hal melaksanakan tugas dan bersikap untuk mencapai tujuan dari pada organisasi tersebut, sehingga peranan pimpinan juga tergantung pada waktu dan kesempatan dalam menjalankan tugas pekerjaan.

Dalam peningkatan kinerja DPRD perlu diperhatikan kemampuan kerja DPRD dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan atasan sebagai sumbangan pada sekretariat DPRD dengan tujuan tertentu dalam meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi kerja. Kemampuan kerja yang dimiliki seorang DPR juga dapat disesuaikan dengan pemanfaatan waktu yang ada, artinya dapat menghargai waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana, menjadwalkan dan menetapkan waktu penyelesaian semua kegiatan, serta pemanfaatan waktu dalam hal peranan pimpinan selain itu juga kemampuan kerja DPR harus memiliki pencapaian kerja organisasi yang ditetapkan secara rasional, kemampuan serta potensi yang dimiliki.

Setiap pemimpin dalam organisasi bertanggung jawab untuk memajukan atau mengembangkan bawahannya. Untuk itulah perlu adanya program untuk memajukan DPR yang dapat melakukan melalui berbagai aktivitas diantaranya pendidikan pelatihan dan pengalaman.

Dengan adanya analisis diatas dapat dikatakan bahwa hubungan antara peranan pimpinan terhadap peningkatan kinerja DPR saling berkaitan dimana jika peranan pimpinan berjalan dengan baik maka kinerja pasti tinggi.

3. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka berikan penulis memebrikan kesimpulan sekaligus beberapa saran.

a. Kesimpulan

1. Pimpinan DPRD memiliki peran besar tetapi belum maksimal dalam kerjanya.
2. Peningkatan Kinerja pegawai itu menjadi tanggungjawab pimpinan untuk mendorong, mengedukasi dan melakukan pelatihan tetapi belum maksimal dilaksanakan.

b. Saran

Agar pegawai berkinerja baik dan meningkatkan prestasinya maka Pimpinan dewan Perwakilan Daerah mengoptimalkan perannya untuk memberikan perhatian berupa dorongan (insentif-insetif), nasehat dan pelatihan agar pelayanan public dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus profesionalitas pegawai Nampak dalam pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, D. (1973). Metode penelitian statistik. LP3ES.
- Gie, T. L. (1981). Efisien kerja pembangunan negara. Gajah Mada University Press.
- Lateiner, R. A. (1985). Tehnik memimpin pegawai dan manajemen. Aksara Baru.
- Moekijat. (2002). Administrasi kepegawaian negara Indonesia. Moekijat Press.
- Ruky, A. S. (2001). Sistem manajemen kinerja: Paduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja prima. Gramedia.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1989). Metode penelitian survey. LP3ES.
- Steers, R. M. (1985). Efektifitas organisasi. Erlangga.
- Sumandi, S. (2003). Metode penelitian. PT. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, W., & Winarno, B. (1990). Pengantar penelitian ilmiah: Dasar metode dan teknik (4th ed.). Tarsito.
- Tauziduhu, N. (1980). Research teori metodologi administrasi. PT. Bina Aksara.